

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Daerah: Studi Kasus BPKD Aceh Barat.

Rozahatul Jannah¹, Fatmayanti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received : 08 May 2025

Revised : 18 June 2025

Accepted : 25 July 2025

KEYWORDS

Implementation of Government Accounting Standards, Effectiveness of Internal Control, Performance Quality of Regional Apparatuses.

CORRESPONDENCE

E-mail: rozahtuljannah1605@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effect of Government Accounting Standards (SAP) implementation and the effectiveness of the Internal Control System (ICS) on the quality of local government performance at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of West Aceh. The study addresses issues of non-compliance with accounting procedures, weak internal controls, and financial irregularities that may affect organizational performance. Data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that the implementation of Government Accounting Standards has a significant positive effect on performance quality ($\text{sig.} = 0.000 < 0.05$), while the effectiveness of the Internal Control System has no significant partial effect ($\text{sig.} = 0.331 > 0.05$). However, both variables jointly have a significant effect on performance quality. The findings suggest that strengthening compliance with Government Accounting Standards is essential for improving local government performance. Future research is recommended to include additional variables, such as human resource competence and leadership style, to provide a more comprehensive understanding of factors influencing local government performance.

PENDAHULUAN

Kinerja aparatur daerah yang berkualitas merupakan faktor kunci dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kinerja aparatur daerah yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mampu mengelola sumber daya keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Ditengah banyaknya tuntutan terhadap reformasi birokrasi, evaluasi terhadap kinerja aparatur daerah menjadi suatu keharusan, apalagi pada instansi yang strategis, seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja aparatur di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sangat menentukan keberhasilan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola merupakan rangkaian dari sistem, proses, dan struktur yang memandu dan mengendalikan operasi bisnis. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perilaku etis dalam suatu badan bisnis. Bisnis pemerintah lebih diarahkan kepada layanan jasa publik yang lebih mengutamakan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhannya dan publik perlu merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan (Hasanah, 2024). Oleh karena itu, upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tanggung jawab yang krusial bagi suatu negara. Good governance memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, serta pengambilan keputusan yang rasional dan bijaksana (Hasanah, 2024).

Namun pada praktiknya, masih ditemukan permasalahan yang mempengaruhi kualitas kinerja aparatur daerah, seperti kurangnya kepatuhan terhadap prosedur akuntansi pemerintah, lemahnya Sistem

Pengendalian Internal (SPI), serta adanya kasus penyimpangan keuangan yang melibatkan oknum pegawai di instansi tertentu. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas kinerja aparatur daerah, salah satunya adalah masih ditemukannya kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (Misalnya: aparatur daerah harus segera beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat sehingga mempengaruhi pemerintah daerah yang berkenaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah); Kurang optimal Sistem Pengendalian Internal (SPI) sehingga bermunculan berbagai kasus penyimpangan keuangan yang melibatkan oknum pegawai instansi tertentu (Misalnya : berdasarkan sumber informasi serambinews.com menyatakan bahwa adanya kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh mantan bendahara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang memadukan prosedur manual dan proses elektronik dalam rangka pengumpulan data, pencatatan, serta pelaporan seluruh transaksi keuangan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada setiap entitas pemerintahan daerah (Mulyadi, 2017). Disisi lain, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga berperan penting dalam menjaga integritas dan keandalan pelaporan keuangan serta mencegah terjadinya penyimpangan (Fraud). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memegang peranan penting dalam suatu organisasi, karena seiring dengan meningkatnya ukuran atau kompleksitas instansi pemerintah, maka tuntutan terhadap kinerja organisasi juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, penerapan SPIP yang efektif menjadi krusial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, transparan, dan akuntabel (Rifan, et.al, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2021) yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah (Studi Pada Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Nagan Raya). Dari hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan tetapi memiliki koefisien regresi yang bernilai positif terhadap kinerja aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah, dan partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan dari penelitian yaitu bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat. Penelitian ini ditulis menggunakan struktur yang berawal dari pendahuluan, kajian teoritis, metode, hasil penelitian, dan diakhiri oleh kesimpulan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemberi mandat) dan agen (pelaksana tugas). Prinsipal menyerahkan wewenang kepada agen untuk menjalankan suatu tugas atau pengelolaan sumber daya dengan harapan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada aparatur pemerintah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik secara transparan, efisien, dan akuntabel demi kepentingan publik.

Namun, permasalahan keagenan kerap muncul karena adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki akses dan pengetahuan yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal. Kondisi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran,

atau perilaku yang tidak selaras dengan tujuan prinsipal. Oleh karena itu, risiko konflik kepentingan dan moral hazard menjadi tantangan utama dalam hubungan agensi, khususnya di sektor publik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif, salah satunya melalui peran auditor sebagai pihak independen yang bertugas memverifikasi dan menilai kewajaran laporan keuangan. Dalam kerangka teori agensi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, SAP dan SPI berfungsi sebagai alat monitoring yang mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur daerah.

Konsep Kinerja

Kinerja merupakan ukuran hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Mangkunegara (2017), kinerja mencakup aspek kualitas dan kuantitas kerja yang dapat diukur dan dievaluasi. Dalam sektor publik, penilaian kinerja sangat krusial untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi terpenuhi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja aparatur daerah dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas pengelolaan keuangan serta kualitas pelayanan publik yang diberikan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparatur mampu menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya daerah secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan seperangkat prinsip, kebijakan, dan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Utami, 2024). SAP berlaku bagi seluruh entitas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dan bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan publik.

Penerapan SAP yang konsisten dan benar akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah. Selain itu, SAP juga menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI)

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. SPI meliputi pengendalian atas pelaporan keuangan yang andal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas operasional (Martini et al., 2019).

Efektivitas SPI sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan fraud, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya SPI yang efektif, organisasi dapat menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

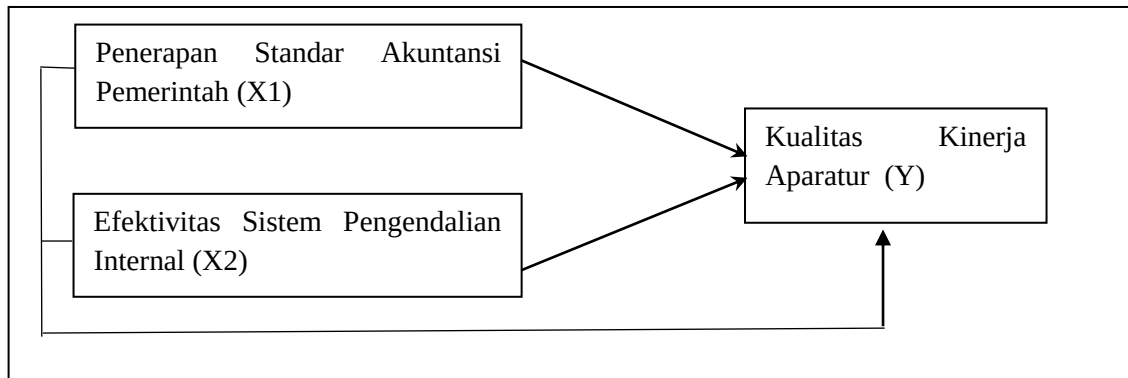
Berdasarkan kajian teori dan tinjauan literatur yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja aparatur daerah.

H2: Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja aparatur daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai variabel bebas yang memengaruhi kualitas kinerja aparatur daerah sebagai variabel terikat. SAP berfungsi sebagai pedoman akuntansi yang transparan dan andal dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan SPI bertugas memastikan seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai aturan, efisien, dan tertib. Kombinasi kedua mekanisme pengendalian tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja aparatur daerah dengan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas kinerja aparatur daerah. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Sampel sebanyak 40 responden dipilih secara purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22 dengan teknik regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Daerah

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat sehingga H1 pada penelitian ini diterima. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan dari hasil yang disajikan bahwa $t_{hitung} 4,938 > t_{tabel} 2,026$ sedangkan nilai $Sig (0,000) < 0,05$.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas kinerja aparatur daerah. Karena standar akuntansi pemerintah itu adalah standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus diterapkan oleh pemerintah setiap daerah. Jadi aparatur daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat tinggal menjalankan standar yang sudah ada tanpa perlu merumuskan standar akuntansi pemerintah yang akan diterapkan. Ketika standar akuntansi pemerintah sudah diterapkan secara maksimal oleh aparatur daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, maka

akan menghasilkan kualitas kinerja aparatur daerah yang baik dikarenakan sudah mampu menjalankan tugasnya dalam penerapan standar akuntansi pemerintah.

Akan tetapi, dalam penerapan standar akuntansi pemerintah ternyata sangat dipengaruhi oleh kompetensi manusianya. Jika aparatur daerah yang berkerja di bagian penerapan standar akuntansi pemerintah berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi, maka setiap tugas yang diberikan yang berkenaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah akan lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaannya. Sementara jika aparatur daerah yang bekerja dibagian penerapan standar akuntansi pemerintah bukan berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi, maka setiap tugas yang diberikan yang berkenaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah cenderung akan lebih lama dalam penyelesaian pekerjaannya dikarenakan kemampuan aparatur daerah yang memerlukan pengetahuan dan pelatihan tambahan yang berkenaan dengan keilmuan akuntansi, khususnya penerapan standar akuntansi pemerintah.

Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Daerah

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan dari hasil yang disajikan bahwa $t_{hitung} 0,985 < t_{tabel} 2,026$.

Dalam instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, aparatur daerah yang menjalankan fungsi sebagai sistem pengendalian internal tidak berada dalam bidang tersendiri (Independen). Akan tetapi, masuk kedalam bidang pendapatan. Hal ini bisa saja membuat aparatur daerah yang menjalankan fungsi sistem pengendalian internal kesulitan dalam menjalankan fungsinya dikarenakan potensi munculnya intervensi dari pihak internal lainnya. Padahal aparatur daerah yang menjalankan fungsinya dalam penerapan sistem pengendalian internal haruslah independen, berintegritas, dan penuh ketegasan dalam mendeteksi temuan-temuan sekecil apapun, sehingga kedepannya tidak muncul penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur daerah di instansi tersebut. Hal ini bisa saja menjadi faktor penyebab yang membuat sistem pengendalian internal yang ada tidak mempengaruhi kualitas kinerja aparatur daerahnya.

Selain itu masa jabatan pimpinan Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat yang cenderung tidak lama (biasanya 2-3 tahun menjabat). Jika pimpinannya sering berganti, dikhawatirkan kurang mengenal budaya kerja aparatur daerah dilingkungan instansi tersebut, sehingga jikalau ada temuan-temuan yang harus segera diperbaiki yang berkenaan dengan kualitas kinerja aparatur daerah malah kurang terdeteksi apalagi dapat segera diselesaikan. Sehingga hal ini membuat efektivitas sistem pengendalian internal tidak mampu mempengaruhi kualitas kinerja aparatur daerah. Kurangnya pemahaman dan pelatihan aparatur daerah terkait tujuan dan manfaat sistem pengendalian internal juga dapat membuat sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas kinerja aparatur daerah, karena bisa saja aturan sistem pengendalian internal sudah tersedia, akan tetapi karena kurangnya pemahaman terkait sistem pengendalian internal sehingga aturan sistem pengendalian internal yang sudah dibuat tidak mampu berjalan secara maksimal.

Hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik T) untuk masing-masing variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas kinerja aparatur daerah dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel.1 Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	15.446	5.454		2.832
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.532	.108	.634	4.938
	Sistem Pengendalian Internal	.074	.075	.126	.985

a. Dependent Variable: Kualitas Kinerja

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Daerah.

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas kinerja aparatur daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat sehingga menerima H3. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan dari hasil yang disajikan bahwa nilai $F_{hitung} (17, 024) > \text{nilai } F_{tabel} (3,25)$.

Ketika Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterapkan dengan baik, mulai dari kompetensi aparatur daerahnya yang mampu menjalankan penerapan standar akuntansi pemerintah dengan baik. Didukung oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berjalan secara efektif dilingkungan Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, mulai dari kesadaran akan pentingnya sistem pengendalian internal dalam menjaga kualitas kinerja aparatur daerah terutama dalam penerapan standar akuntansi pemerintah. Sehingga dua hal itu (penerapan sistem akuntansi pemerintah dan efektivitas sistem pengendalian internal) menjadi hal yang penting dalam menjaga kualitas kinerja aparatur daerah agar menjadi lebih tertib, transparan, dan terkontrol. Ini secara langsung akan meningkatkan kualitas kinerja aparatur daerah, karena mereka berkerja dalam sistem yang jelas, terukur, dan terstandarisasi.

Hasil uji simultan (uji statistik F) pada penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas kinerja aparatur daerah dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388.161	2	194.080	17.024	.000 ^b
	Residual	421.814	37	11.400		
	Total	809.975	39			

a. Dependent Variable: Kualitas Kinerja
b. Predictors: (Constant), SistemPengendalian Internal, PenerapanStandarAkuntansiPemerintah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja aparatur daerah, sedangkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh secara parsial. Namun, secara simultan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja aparatur daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai upaya memperbaiki kualitas kinerja aparatur. Selain itu, efektivitas Sistem Pengendalian Internal perlu mendapat perhatian lebih agar dapat berkontribusi optimal terhadap kinerja. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menguji variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja aparatur, seperti kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan. Selain itu, perluasan objek penelitian di berbagai daerah akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi hasil yang lebih baik.

REFERENSI

- Hasanah, I, N. 2024. 'Strategi Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pengembangan Manajemen Resiko'. <https://inspektorat.lebakkab.go.id>
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Jakarta :Salemba Empat.
- Rifan, A., Pratidina, G., dan Salbiah, E. 2019. 'Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi' *Jurnal Governansi*, 5 (2).
- Purwati, T, P. 2021. 'Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah'. Skripsi : Halaman 68-69.
- Jensen, M, C., dan Meckling, W, H. 1976. 'Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure' *Journal of Financial Economics*, 3(4) : 305-360.
- Mangkunegara, A, P. 2017. 'Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan Ketiga ed.)'. Bandung :Alfabeta Press.
- Kusuma, R, B, F., Susbiyani, A., dan Fitriya, E. 2020. 'Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Situbondo)' *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Utami, N, W. 2024. 'Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) : Pengertian, Dasar Hukum, Perubahan Basis Akrual, dan Manfaatnya dalam Transparansi Keuangan Negara, Mekari Jurnal.